

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara republik yang menjunjung tinggi prinsip desentralisasi dalam pemerintahannya sebagai negara kesatuan. Desentralisasi kekuasaan dan wewenang memungkinkan daerah untuk mengembangkan sektor ekonomi dan layanan publik sesuai dengan karakteristik daerahnya dengan memanfaatkan potensi unik mereka, yang meliputi sumber daya alam, budaya, pariwisata, dan kearifan lokal yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Suriadi, Frinaldi, Magriasti, & Yandri, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi diartikan “Pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom yang didasarkan asas otonomi”. Hal ini mempermudah penerapan otonomi daerah yang lebih luas dan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan memberikan setiap daerah kebebasan dan hak untuk mengatur urusan internalnya sendiri di dalam wilayahnya. Konsep tata kelola yang dikenal sebagai otonomi daerah memberikan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa dalam yurisdiksi tertentu) kekuasaan untuk mengendalikan dan mengelola layanan publik, pembangunan, dan urusan pemerintahan di wilayah masing-masing sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik daerah mereka masing-masing (F. Hadi, Gandryani, & Afifah, 2025).

Otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengendalikan dan mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri serta

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa tujuan utama otonomi daerah adalah mempercepat pembangunan daerah yang adil, mengurangi kesenjangan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Tunut, Sukiyono, & Ekaputri, 2022). Diharapkan bahwa melalui otonomi daerah, setiap daerah akan mampu menciptakan strategi dan program pembangunan ekonomi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik unik mereka, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan (Rizki, Setiady, & Astawa, 2023). Otonomi daerah memberi pemerintah daerah kebebasan untuk menciptakan dan melaksanakan layanan publik yang lebih baik melayani kebutuhan masyarakat dan lebih mudah diakses oleh masyarakat (Simamora, Girsang, Purba, & Ivanna, 2023).

Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, “desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sesuai dengan pasal tersebut, dijelaskan bahwa desa memiliki wewenang untuk melaksanakan pemerintahan mereka sendiri dan memprioritaskan masalah daerahnya. Pemerintah desa diharuskan untuk

memanfaatkan wewenang ini sebaik-baiknya dengan mengelola potensi yang sudah ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Subekti, 2024).

Pengembangan desa wisata merupakan salah satu potensi desa yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sudibya (2018) Desa Wisata merupakan aset pariwisata yang berbasis pada potensi pedesaan dengan segala kekhasan dan daya tariknya dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk pariwisata. Selain itu, mengutip dari Hadiwijaya (2012) dalam (Bisri, Alamsyah, & Nuzula, 2023) terbentuknya desa wisata itu memiliki beberapa karakteristik yaitu aksesibilitas yang baik, yang memudahkan pengunjung untuk menggunakan berbagai moda transportasi, memiliki hal-hal menarik yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata, seperti kuliner lokal, alam, seni dan budaya, serta legenda, masyarakat dan pemerintah desa memberikan dukungan adanya desa wisata dan para pengunjung disambut dengan baik, keamanan desa terjamin, tersedia tenaga kerja, telekomunikasi, dan akomodasi yang memadai, beriklim sejuk, dan terhubung dengan destinasi wisata lain yang sudah dikenal luas oleh masyarakat umum. Dalam mengembangkan desa wisata, sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan pengunjung terpenuhi dengan beragam atraksi wisata, pilihan penginapan, dan layanan pariwisata pendukung yang dicapai dengan mengintegrasikan komponen-komponen tersebut ke dalam kehidupan sosial masyarakat yang terorganisir, yang selaras dengan tradisi dan adat istiadat yang berlaku (Suprpto, Pantyasa, & Sutiarmo, 2023).

Presiden Republik Indonesia telah menerapkan program untuk menciptakan lembaga-lembaga desa, khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), sebagai organisasi komersial yang mengelola unit usaha ekonomi desa. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dibentuk, dikelola, dan dikembangkan agar membantu menumbuhkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Maryunani (2008) dalam (Asriani & Miswar, 2021) Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah usaha tingkat desa yang dikelola secara kooperatif oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dibentuk dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi desa dengan tujuan utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan integritas sosial desa.

Sebagai pemerintah desa, kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa dan masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan program-program yang ada dengan sebaik-baiknya melalui pengelolaan potensi setiap wilayah pedesaan. Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) harus mempunyai kemampuan yang memadai untuk mengawasi berbagai unit ekonomi di dalam desa (Maulidyah, Utami, & Marzuqi, 2025). Kesiapan BUM Desa tersebut dapat dilihat melalui berbagai inovasi dan kapasitas BUM Desa dalam perancangan strategi. Dengan menawarkan beragam layanan dan fasilitas perdagangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi desa, BUM Desa membantu pemerintah desa memenuhi tanggung jawabnya dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat (S. Hadi, Marta, Amin, & Febrina, 2024). Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa

keberadaan BUM Desa dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memaksimalkan inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Di Indonesia berdasarkan informasi dari portal resmi Kementerian Desa (Kemendesa) Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, jumlah BUM Desa per Januari 2026 sebanyak 64.781 dengan rincian 40.885 BUM Desa telah berbadan hukum, sementara 16.481 BUM Desa sudah terverifikasi nama, 5.899 BUM Desa dalam proses melakukan perbaikan dokumen, 818 BUM Desa dalam proses mendaftar badan hukum, 574 BUM Desa melakukan perbaikan nama, dan 24 BUM Desa mendaftar nama.

Dari sekian banyaknya jumlah BUM Desa yang ada di Indonesia, menurut data Kemendesa PDTT, Provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama sebagai provinsi dengan jumlah BUM Desa tertinggi dengan total 7.720 BUM Desa. Dengan rincian 6.585 BUM Desa sudah berbadan hukum, 373 melakukan perbaikan dokumen, 218 mendaftar badan hukum, 534 telah terverifikasi nama, 5 sedang melakukan perbaikan nama, dan 5 baru mendaftar nama. Posisi ini disusul dengan Provinsi Jawa Tengah yang menempati posisi kedua dengan total 7.706 BUM Desa, kemudian Provinsi Aceh menempati urutan ketiga dengan total 6.247 BUM Desa. Sementara itu, Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah desa mandiri terbanyak di Indonesia, semakin mendukung posisi unggul ini. Provinsi Jawa Timur memecahkan rekor dengan jumlah desa mandiri terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2025 Provinsi Jawa Timur tercatat memiliki 4.716 desa mandiri yang mana hal ini menunjukkan terus meningkatnya jumlah desa mandiri di Provinsi Jawa Timur. Hal ini didukung oleh pernyataan Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar

Parawansa yang dikutip dalam (Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur, 2025) yang menyatakan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah desa mandiri terbanyak dengan jumlah 4.716 desa mandiri.

“ro-organisasi.jatimprov - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras seluruh elemen masyarakat desa, pemerintah kabupaten/kota, serta pendamping desa yang telah bersinergi dalam mendorong kemandirian desa. Saat ini di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 20.503 desa mandiri, 23.579 desa maju, 21.813 desa berkembang, 4.672 desa tertinggal, dan 4.694 desa sangat tertinggal. Dengan raihan 4.716 desa mandiri, Jawa Timur memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan desa di Indonesia”.

Sumber: <https://ro-organisasi.jatimprov.go.id/news/detail/547-jatim-miliki-4716-desa-mandiri-dan-jadi-yang-tertinggi-se-indonesia-gubernur-khofifah-komitmen-bangun-desa-melalui-program-berkelanjutan.html> (diakses pada 22 Januari 2026 Pukul 13.30)

Selain tercatat sebagai Provinsi dengan BUM Desa dan desa mandiri terbanyak, Provinsi Jawa Timur juga memiliki desa wisata tertinggi di Indonesia. Menurut Jejaring Desa Wisata (Jadesta) dalam (Christy & Hardjati, 2025) per 21 Oktober 2024, terdapat 6.026 desa wisata yang tersebar di beberapa wilayah. Kelompok ini terdiri dari 4.687 desa wisata rintisan, 992 desa wisata berkembang, 314 desa wisata maju, dan 33 desa wisata mandiri. Di antara sepuluh provinsi dengan desa wisata terbanyak, Provinsi Jawa Timur berada di peringkat pertama. Terdapat 603 desa wisata di provinsi ini, termasuk 461 desa wisata rintisan, 77 desa wisata berkembang, 60 desa wisata maju, dan 5 desa wisata mandiri. Oleh karena itu, pembentukan desa wisata sangat penting dalam mendorong terwujudnya desa mandiri di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, besaran unit BUM Desa yang dimiliki Provinsi Jawa Timur, menunjukkan komitmen dan dedikasi Pemerintah Provinsi untuk mendorong setiap kabupaten/kota mendirikan BUM Desa guna

meningkatkan perekonomian dan potensi desa untuk menciptakan desa yang mandiri dan berdaya saing (Septianingrum & Fanida, 2024). Melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Desa Mandiri, pengembangan desa wisata memiliki kemampuan untuk meningkatkan perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja baru dan peluang bisnis bagi masyarakat melalui UMKM. (Kurniawan, Himni, & Sulhairi, 2022).

Kabupaten Jombang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, memiliki 302 desa, 4 kelurahan, dan 21 kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, pemerintah berupaya memenuhi kompleksitas pembangunan masyarakat pedesaan yang semakin meningkat, sehingga pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sangat diperlukan. Saat ini BUM Desa yang telah terbentuk sebanyak 302 BUM Desa di Kabupaten Jombang. 281 BUM Desa telah resmi terdaftar sebagai badan hukum dan 77 BUM Desa dengan kategori maju. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Jombang memperkuat pembentukan BUM Desa dengan ditingkatkannya kualitas aparatur pemerintah desa dan BUM Desa sehingga diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kemakmuran di desa. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Ketua DPMD Kabupaten Jombang yang dikutip dari radar jombang.

“radarjombang.jawapos.com - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang, juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintah desa dan BUM Desa. Hal ini untuk memakmurkan desa”.

Sumber: <https://radarjombang.jawapos.com/politik-pemerintahan/663007745/komitmen-dpmd-jombang-tingkatkan-kualitas-aparatur-pemerintah-desa-dan-bumdes> (diakses pada 22 Januari 2026 Pukul 19.53)

Pendirian BUM Desa di Jombang terealisasi pada tahun 2015 dengan jumlah 302 unit yang tersebar di 302 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Jombang bergabung dengan Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Bangkalan, dan Kota Batu di antara delapan kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang setiap desanya sudah memiliki BUM Desa (Septianingrum & Fanida, 2024).

Melalui Peraturan Bupati Jombang Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Desa Wisata Kabupaten Jombang memiliki kekuasaan dalam memanfaatkan serta mengembangkan potensi daerahnya sendiri (otonomi daerah) di sektor pariwisata berbasisi desa. Dalam upaya diversifikasi destinasi wisata, Kabupaten Jombang baru-baru ini juga mendorong pertumbuhan Desa Wisata. Diversifikasi wisata yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jombang ini juga didukung dengan adanya peningkatan jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Kabupaten Jombang. Berikut data Kunjungan wisatawan nusantara Kabupaten Jombang tahun 2020 – 2024:



Gambar 1.1 Grafik Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Kabupaten Jombang

Sumber: <https://sambang.jombangkab.go.id/front/data/457-kunjungan-wisata> Satu Data Jombang, 2025 (diakses dan diolah oleh peneliti pada 25 November 2025)

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan Kabupaten Jombang terus mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2020 kunjungan wisatawan nusantara berjumlah 293.815, pada tahun 2021 kunjungan wisatawan berjumlah 373.848, pada tahun 2022 kunjungan wisatawan berjumlah 1.476.053 yang mana pada tahun ini kunjungan wisatawan naik drastis setelah pemulihan pasca terjadinya *Covid-19* yang menyebabkan sejumlah destinasi wisata di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Jombang ditutup. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 kunjungan wisatawan di Kabupaten Jombang juga terus mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2023 sebesar 1.776.584 dan tahun 2024 sebesar 2.511.944. Hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Jombang memiliki potensi dan beragam wisata menarik yang dapat dikunjungi oleh masyarakat. Adanya pertumbuhan kunjungan wisatawan ini juga merupakan hasil dari kemajuan BUM Desa dalam mengembangkan destinasi wisata khususnya Desa

Wisata. Sehingga strategi pengembangan BUM Desa menjadi penting dalam mendukung kemajuan Desa Wisata di Kabupaten Jombang.

Sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Jombang yang memiliki Desa Wisata telah diakui melalui Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/200/415.10.1.3/2025 tentang Desa Tematik Tahun 2025, Kecamatan Mojoagung merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang yang memiliki 18 (delapan belas) desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Nama – Nama Desa di Kecamatan Mojoagung

NO.	NAMA DESA	NO.	NAMA DESA
1.	Miagan	10.	Karangwinongan
2.	Mojotrisno	11.	Betek
3.	Mancilan	12.	Janti
4.	Kademangan	13.	Murukan
5.	Kauman	14.	Karobelah
6.	Tanggalrejo	15.	Johowinong
7.	Dukuhmojo	16.	Tejo
8.	Dukuhdimoro	17.	Kedunglumpang
9.	Gambiran	18.	Seketi

Sumber: Rencana Strategis Kecamatan Mojoagung Tahun 2024 – 2026

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Kecamatan Mojoagung memiliki 18 (delapan belas) desa yang tersebar di wilayah Kecamatan Mojoagung. Di samping itu, desa yang ada di Kecamatan Mojoagung sudah terbentuk BUM Desa dengan kategori yang berbeda, baik maju maupun masih berkembang. Berikut merupakan data mengenai BUM Desa di Kecamatan Mojoagung:

**Tabel 1. 2 Nama Desa & BUM Desa, Tahun, dan Kategori BUM Desa Se
Kecamatan Mojoagung**

NO	Desa/Kelurahan	Nama BUM Desa	Tahun	Kategori BUMDesa
1.	Desa Kedunglumpang	Karya Abadi	2015	Maju
2.	Desa Dukuh Mojo	Desa Maju Jaya	2015	Berkembang
3.	Desa Karangwinongan	Lentera Jaya	2015	Maju
4.	Desa Kademangan	Al Amanah	2015	Berkembang
5.	Desa Janti	Janti Makmur	2015	Maju
6.	Desa Tejo	Pelita Harapan Sejahtera	2015	Maju
7.	Desa Gambiran	Gambiran Makmur	2022	Berkembang
8.	Desa Kauman	Kauman Madani	2015	Berkembang
9.	Desa Mojotrisno	Trisno Sejahtera	2015	Maju
10.	Desa Tanggalrejo	Rejo Mulyo	2015	Berkembang
11.	Desa Dukuhdimoro	Sakura	2015	Maju
12.	Desa Miagan	Kreto Makmur	2015	Maju
13.	Desa Mancilan	Jati Mulyo	2021	Maju
14.	Desa Betek	Betek Bangkit Mandiri	2015	Berkembang
15.	Desa Karobelah	Makmur Jaya	2015	Berkembang
16.	Desa Murukan	Langgeng Jaya	2015	Berkembang
17.	Desa Johowinong	Johowinong Makmur	2015	Berkembang
18.	Desa Seketi	Seketi Makmur	2015	Maju

Sumber: Data Desa Center Dinas PMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (diolah
oleh peneliti)

Berdasarkan tabel 1.2 terdapat 18 BUM Desa yang ada di Kecamatan Mojoagung yang mana sesuai dengan jumlah desa yang ada di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh desa yang ada di Kecamatan Mojoagung sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) masing-masing. Dari 18 BUM Desa terdapat 9 BUM Desa berkembang dan 9 BUM Desa maju. Salah satu desa dengan BUM Desa kategori maju adalah Desa Mojotrisno dengan BUM Desa Trisno Sejahtera yang berdiri pada tahun 2015.

Secara geografis Desa Mojotrisno adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mojoagung yang berada dibagian utara Kabupaten Jombang dengan luas wilayah 1.293,827 Ha dan populasi penduduk sebesar 4.093. Seiring dengan berjalannya waktu Desa Mojotrisno berkembang menjadi Desa Wisata yang berada di bawah pengelolaan BUM Desa Trisno Sejahtera. BUM Desa Trisno Sejahtera sudah berdiri sejak tahun 2015, tetapi baru ditetapkan mulai tahun 2021 melalui Peraturan Desa (Perdes) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Trisno Sejahtera”.

Desa Mojotrisno merupakan desa yang berkembang menjadi Desa Wisata mulai tahun 2022 dengan destinasi wisata unggulan yaitu Wisata Pasar Barongan. Kemudian juga terdapat beberapa destinasi lain seperti Taman Dolanan, Sentra Wastra, Sentra Cor Kuningan, Tembikar Mojotrisno, dan Green House Melon. Destinasi wisata tersebut dikemas menjadi satu dalam Desa Wisata Mojotrisno dengan konsep Desa Wisata berbasis budaya dan edukasi. Selain itu, Desa Wisata Mojotrisno didirikan berbasis ekonomi kerakyatan dengan mengedepankan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Desa wisata Mojotrisno

masuk dalam 300 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 sejak dua tahun Desa wisata Mojotrisno berdiri sebagai salah satu dari empat Desa Wisata di Kabupaten Jombang, seperti dikutip dari website desakita.co:

“Desakita.co – Sebanyak empat desa wisata di Kabupaten Jombang masuk dalam 300 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024. Wisata Desa Mojotrisno menghadirkan beberapa sajian khas tempo dulu. Mulai sajian kuliner tradisional hingga gelaran Pasar Barongan Kaligunting yang diselenggarakan minggu pertama dan ketiga tiap bulannya. Di wisata ini, ada beberapa wahana dan sajian yang ada. Misalnya kuliner tradisional mulai Rp 4.000, wisata edukasi tepi sawah dan komoditas hidroponik mulai Rp 20.000, edukasi batik cap warna alam mulai Rp 30.000. Edukasi cor kuningan Rp 30.000 maupun edukasi cor tembikar majapahitan Rp 30.000”.

Sumber: <https://desakita.co/wisata/5836/keren-4-desa-wisata-di-jombang-masuk-300-besar-anugerah-desa-wisata-indonesia-2024-ini-rincian-beserta-harga-tiketnya/> (diakses pada 21 Desember 2025 Pukul 21:15)

Selanjutnya, Desa Wisata Mojotrisno meraih Juara 3 (tiga) dalam ajang lomba Desa Wisata yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2023. Hal ini seperti dilansir pada website jombangkab.id:

“JOMBANGKAB – Pj. Bupati Jombang Dr. Drs. Teguh Narutomo, M.M., menyerahkan hadiah pemenang lomba Desa Wisata Tahun 2023 di Aula Wisata Sumber Celeng pada Selasa (26/11/2024). Saya ucapkan selamat kepada para pemenang lomba desa wisata tahun 2023, yaitu Desa Ngampungan Kecamatan Bareng dengan wisata Pandansili, Desa Bulurejo Kecamatan Diwek dengan Agrowisata Sumberceleng, dan Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung dengan wisata Pasar Barongan”, tutur Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo.

Sumber: <https://www.jombangkab.go.id/berita/pariwisata/dukung-pariwisata-jombang-pj-bupati-teguh-narutomo-beri-penghargaan-tiga-desa-wisata-10854> (diakses pada 21 Desember 2025 Pukul 22:06)

Selain mengembangkan wisata berbasis budaya dan edukasi, Desa Wisata Mojotrisno juga menjadikan kebersihan lingkungan sebagai salah satu faktor pendukung utama dalam pengembangannya. Pada tahun 2025, Desa Wisata Mojotrisno dengan Wisata Pasar Barongan tercatat sebagai satu-satunya Desa Wisata yang mewakili Kabupaten Jombang dan masuk dalam 10 besar kategori Desa Wisata Bersih di tingkat Provinsi Jawa Timur. Seperti dikutip dari laman Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Jombang:

“disporapar.jombangkab- Kembali berprestasi, dalam gelaran Lomba Desa Wisata Bersih yang merupakan rangkaian Festival Dewi Cemara 2025, desa Mojotrisno masuk dalam 10 besar desa wisata bersih tingkat provinsi. Setelah pada tahun 2024 lalu mendapat predikat sebagai desa wisata dengan produk terunik (cor kuningan), kali ini Mojotrisno kembali mengukir nama di kancah desa wisata seprovinsi Jawa Timur sebagai salah satu dari 10 desa yang menerima predikat desa wisata bersih dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur”.

Sumber: <https://disporapar.jombangkab.go.id/berita/visitasi-desawisata-mojotrisno-13458> (diakses pada 21 Desember 2025 Pukul 20:58)

Dari beberapa prestasi yang diraih oleh Desa Mojotrisno hal ini tentunya tidak lepas dari pengelolaan yang dilakukan oleh BUM Desa Trisno Sejahtera. Selain mengelola Desa Wisata, BUM Desa Trisno Sejahtera berupaya meningkatkan pendapatan untuk mendukung Pendapatan Asli Desa (PADes) dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh untuk mendorong perekonomian lokal. BUM Desa Trisno Sejahtera mengelola beberapa unit, yaitu Wisata Pasar Barongan, Taman Dolanan, dan Green House Melon. Kemudian ada Pujasera, Gedung Serbaguna & alat pesta, Layanan Internet, PPOB (pembayaran online) dan TPS3R. Desa Wisata Mojotrisno, dengan daya tarik utama berupa Wisata Pasar Barongan, merupakan unit wisata awal yang menjadi cikal bakal

terbentuknya Desa Wisata Mojotrisno serta membuka peluang bagi pengembangan unit wisata lainnya. Selain itu, Desa Mojotrisno dengan Wisata Pasar Barongan tercatat sebagai salah satu dari dua Desa Wisata di Kabupaten Jombang yang telah memperoleh legalitas resmi dari Pemerintah Kabupaten Jombang, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/200/415.10.1.3/2025 tentang Desa Tematik Tahun 2025.

Wisata Pasar Barongan secara resmi dibuka pada bulan Agustus tahun 2022 yang berawal dari lahan kosong milik warga (barongan) yang kemudian dibersihkan lalu dibuat bangunan-bangunan dari bambu. Setelah itu, baru muncul ide dan gagasan inovasi dari pemerintah desa dan salah satu lembaga perguruan tinggi di Surabaya untuk menjadikan lahan tersebut menjadi destinasi wisata yaitu Wisata Pasar barongan. Wisata Pasar Barongan merupakan destinasi wisata berbasis budaya yang menjunjung nilai-nilai tradisional di dalamnya. Wisata Pasar Barongan ini beroperasi secara berkala dua kali dalam sebulan (minggu pertama dan ketiga) dengan menyuguhkan beragam unsur budaya lokal seperti pertunjukan seni, makanan tradisional, dan pakaian adat (Rofiah & Eryana, 2024). Berdasarkan observasi pra penelitian, kegiatan dalam Wisata Pasar Barongan ini merupakan kegiatan wisata bernuansa tradisional yang mengintegrasikan suasana alam di bawah pohon rindang dengan nuansa zaman dulu, tempat duduk berasal dari bambu-bambu dan atap gerobak penjual terbuat dari dedaunan. Alat tukar uang yang digunakan untuk transaksi di dalam Wisata Pasar Baronga tidak menggunakan uang tunai pada umumnya, tetapi pengunjung dapat menukarkan uang tunai dengan kepingan bambu yang nantinya digunakan untuk transaksi di dalam Wisata Pasar

Barongan. Per kepingan bambu di harga 2000/bambu dan pengunjung bebas menukarkan berapapun.

Makanan dan minuman yang dijual di Wisata Pasar Barongan juga berciri khas tradisional seperti jajananan pasar tanpa pengawet dan wedang-wedangan dari rempah-rempah. Selain makanan dan minuman, terdapat batik khas Mojotrisno yang dibuat sendiri oleh masyarakat Mojotrisno juga dijual di Wisata Pasar Barongan dan pengunjung juga dapat melihat secara langsung proses pembuatan batik. Terdapat juga pertunjukkan tarian-tarian tradisional yang ada di Wisata Pasar Barongan pada event-event tertentu. Di samping mengusung nuansa tradisional, Wisata Pasar Barongan juga dikembangkan sebagai destinasi wisata yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan penggunaan kemasan ramah lingkungan, di mana seluruh produk yang diperdagangkan baik makanan, minuman, maupun kerajinan tidak menggunakan bahan plastik. Dengan demikian, keberadaan Wisata Pasar Barongan diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi penggunaan sampah plastik serta meminimalkan pencemaran lingkungan.

BUM Desa sebagai badan usaha yang diberikan wewenang oleh pemerintah desa dalam mengelola Desa Wisata Mojotrisno khususnya Wisata Pasar Barongan, dalam pengelolaannya bekerja sama dengan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Mojotrisno yaitu Pokdarwis “Maringi Trisno”. Adanya kerja sama tersebut disebabkan sumberdaya yang dimiliki oleh BUM Desa Trisno Sejahtera belum cukup memadai untuk mengelola Desa Wisata Mojotrisno khususnya Wisata Pasar Barongan secara mandiri. Pokdarwis Maringi Trisno ini dibentuk oleh pemerintah

desa dengan BUM Desa yang beranggoatakan masyarakat Desa Mojotrisno sendiri. Adanya unit wisata tersebut diharapkan mampu menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekonomi di Desa Mojotrisno, meningkatkan pendapatan BUM Desa hingga dapat menyumbang PADes, serta mampu menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Mojotrisno terutama bagi pelaku UMKM.

Di samping keberhasilan pengelolaan BUM Des dan Pokdarwis dalam mengelola Desa Wisata Mojotrisno khususnya Wisata Pasar Barongan, masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi seperti adanya penurunan pendapatan yang cukup signifikan dari Wisata Pasar Barongan. Berikut merupakan tabel pendapatan Wisata Pasar Barongan tahun 2023-2025.

Tabel 1.3 Pendapatan Wisata Pasa Barongan

NO.	TAHUN	TOTAL PENDAPATAN
1.	2023	18.030.650
2.	2024	5.920.900
3.	2025	230.000

Sumber: BUM Desa “Trisno Sejahtera” Desa Mojotrisno, 17 Desember 2025

Dari tabel 1.3 di atas dapat diketahui bahwa pendapatan Wisata Pasar Barongan yang dikelola oleh BUM Desa Trisno Sejahtera dan Pokdarwis Maringi Trisno mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Tahun 2023 pendapatan yang diperoleh sebesar 18.030.650 juta, pada tahun 2024 menurun menjadi 5.920.900 juta, dan pada tahun 2025 semakin menurun menjadi 230.000 ribu. Pada tahun 2025 terjadi penurunan pendapatan signifikan, yang disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Desa Mojotrisno bersama BUM Desa Trisno Sejahtera untuk tidak menerapkan mekanisme bagi hasil kepada para pedagang

yang beraktivitas di Wisata Pasar Barongan. Sebelumnya, berdasarkan kesepakatan yang berlaku, pedagang di Wisata Pasar Barongan dikenakan skema bagi hasil sebesar 10% kepada BUM Desa Trisno Sejahtera. Selain penurunan pendapatan terdapat permasalahan lain yang dihadapi oleh BUM Desa Trisno Sejahtera dan Pokdarwis Maringi Trisno yaitu permasalahan pada sumberdaya manusia hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Rizal ketua Pokdarwis Maringi Trisno.

“Permasalahan yang dihadapi baik dari pemerintah desa, BUM Desa maupun pokdarwis dalam mengelola desa wisata pasar barongan adalah kendala dalam sumberdaya manusia (SDM). Setiap warga yang ditawarkan atau diajak ikut serta dalam keanggotaan pokdarwis atau mengelola desa wisata selalu bertanya mengenai “nominal”, yang mana dari pihak pemdes, BUM Desa atau pokdarwis juga tidak bisa menjajikan mengenai hal tersebut. Permasalahan yang kedua adalah “basic skill” yang dimiliki oleh pengelola desa wisata mojotrisno. Pengelola desa wisata mojotrisno ini masih harus meningkatkan “basic skill” yang dimiliki karena memang dari awal semua orang yang ikut serta dalam keanggotaan pengelola ini tidak memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mengelola yang namanya desa wisata”.. (Hasil wawancara pra penelitian 27 November 2025).

Dari kendala-kendala di atas, maka hal ini menjadi tantangan bagi BUM Desa dan Pokdarwis dalam mengembangkan potensi Wisata Pasar Barongan yang mana diperlukan strategi yang direncanakan dengan baik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Achsa, Verawati, & Hutajulu (2024) dan Albert, Setiawan, & Mubarokah (2024) yang menegaskan bahwa salah satu komponen kunci pertumbuhan desa wisata adalah perumusan strategi. Selain memberikan pedoman operasional, strategi merupakan kerangka kerja sistematis untuk mengenali peluang, tantangan, dan potensi pengembangan desa wisata secara berkelanjutan. Strategi merupakan instrument penting dalam

meningkatkan efektivitas pengelolaan desa wisata, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta memaksimalkan kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam industri pariwisata yang semakin kompetitif, pertumbuhan desa wisata dapat menjadi tidak terfokus dan kurang kompetitif tanpa strategi yang jelas.

Penelitian terdahulu oleh (Bisri et al., 2023) dengan judul Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mengembangkan Potensi Desa Melalui Wisata Edukasi Kampung Nanas (Studi di Desa Palaan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang) dengan menggunakan teori startegi menurut Suryono (2019) menunjukkan hasil masih belum optimal. Hal ini didukung dengan masih terdapat beberapa permasalahan yaitu belum samanya persepsi mengenai tujuan dibentuk dan dikembangkannya wisata, kemudian manajemen yang belum optimal, struktur pengelola belum diresmikan dengan surat keputusan (SK), serta sumberdaya manusia (SDM) yang masih terbatas dan belum memenuhi kompetensi di bidangnya. Hal ini membuktikan bahwa dibutuhkan perumusan strategi yang baik merupakan hal yang penting guna mendukung pengembangan suatu potensi desa wisata.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti berfokus untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan lebih dalam mengenai strategi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa “Trisno Sejahtera” dalam Pengembangan Wisata Pasar Barongan Di Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang menggunakan teori manajemen strategi oleh Wheelen & Hunger (2012). Manajemen strategi menurut Wheelen & Hunger (2012) merupakan serangkaian

keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang suatu perusahaan. Ini mencakup pengamatan lingkungan (baik eksternal maupun internal), perumusan strategi (perencanaan strategis atau jangka panjang), implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Pendekatan ini dinilai relevan karena mampu menjelaskan bagaimana proses manajemen strategi yang dilakukan oleh BUMDes Trisno Sejahtera dalam pengembangan Wisata Pasar Barongan berlangsung secara menyeluruh, mulai dari tahap pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, hingga evaluasi dan pengendalian.

Menurut Wheelen dan Hunger (2012) pengamatan lingkungan merupakan analisis faktor lingkungan mencakup faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Faktor eksternal meliputi kondisi sosial budaya masyarakat, perkembangan teknologi informasi, serta tuntutan sektor publik dan pemangku kepentingan lainnya, yang dianalisis untuk mengidentifikasi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Sementara itu, faktor internal meliputi struktur organisasi dan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*). Perumusan strategi merupakan Proses penentuan arah dan pemilihan strategi organisasi dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap lingkungan. Hal ini mencakup penetapan misi organisasi (*mission statement*), penentuan tujuan (*objectives*) yang dapat dicapai, pengembangan strategi, proses pengambilan keputusan dan penetapan pedoman kebijakan sebagai acuan dalam mencapai tujuan tersebut. Implementasi strategi merupakan proses

pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan ke dalam bentuk tindakan nyata yang meliputi penyusunan program dan kegiatan, pengalokasian sumber daya dan anggaran, dan prosedur operasional (pembagian tugas dan tanggung jawab). Kemudian yang terakhir, evaluasi dan pengendalian merupakan proses di mana aktivitas perusahaan dan hasil kinerja dipantau sehingga kinerja aktual dapat dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Tahap ini bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan implementasi strategi dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, teori ini dapat menggambarkan secara sistematis bagaimana strategi tidak hanya direncanakan, tetapi juga diimplementasikan dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan dinamika yang terjadi di lapangan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi BUM Desa Trisno Sejahtera dalam mengembangkan Wisata Pasar Barongan dengan judul **“Strategi Badan Usaha Milik Desa “Trisno Sejahtera” dalam Pengembangan Wisata Pasar Barongan Di Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan peneliti pada latar belakang, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut **“Bagaimana Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Trisno Sejahtera” dalam Pengembangan Wisata Pasar Barongan Di Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis strategi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Trisno Sejahtera” dalam Pengembangan Wisata Pasar Barongan Di Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi sejumlah pemangku kepentingan, termasuk peneliti dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Terutama bagi kalangan akademis dan masyarakat yang perlu mengetahui dan memahami lebih lanjut bagaimana Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Trisno Sejahtera” dalam Pengembangan Wisata Pasar Barongan Di Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga terhadap pengembangan administrasi publik, khususnya sebagai sumber informasi mendalam tentang subjek-subjek yang secara teoritis dibahas dalam perkuliahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang baik bagi penelitian di masa mendatang, terutama dalam memahami Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Trisno Sejahtera” dalam Pengembangan Wisata Pasar Barongan Di Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Memiliki pengalaman secara langsung dan diajukan sebagai persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi Publik, serta membuat peneliti memahami bagaimana Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Trisno Sejahtera” dalam Pengembangan Wisata Pasar Barongan Di Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

2. Bagi Pemerintah Desa Mojotrisno dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Trisno Sejahtera

Sebagai saran, masukan, dan evaluasi dalam melaksanakan Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Trisno Sejahtera” dalam Pengembangan Wisata Pasar Barongan Di Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Sebagai informasi, pengetahuan dan dapat dimanfaatkan sebagai acuan atau referensi bagi peneliti lainnya yang ingin mengembangkan penelitian serupa di masa mendatang.